

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Serikat Pekerja RS Haji Jakarta
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 19 Februari 2007
Waktu	: Pukul 14. ⁰⁰ – 16. ⁰⁰ WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	Max Sopacua, SE, M.Sc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Acara	: Membicarakan masalah karyawan RS Haji Jakarta
Anggota yang hadir	: 39 Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI, 9 orang Ijin.

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Serikat Pekerja RS Haji Jakarta pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

RDPU didahului dengan pengantar Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan paparan/jawaban Serikat Pekerja RS Haji Jakarta atas pertanyaan dan tanggapan Komisi IX DPR RI.

II. POKOK PEMBICARAAN

1. Pasca putusan MA No. 05P/HUM/2005, Perda No. 05/2006 dan SK Gubernur Prov DKI Jakarta tanggal 17 Agustus 2006 No. 1311/2006 tentang Pembubaran PT. RS Haji Jakarta dan kembali menjadi Yayasan RS Haji Jakarta.
2. Terdapat 2 permasalahan yang dihadapi oleh RS Haji Jakarta, yaitu masalah Badan Hukum dan masalah Pelayanan Publik.
3. Direksi RS Haji Jakarta mengeluarkan :
 - a. SP 3 kepada 18 pengurus SP
 - b. Surat Skorsing kepada 3 dokter dan 6 perawat
 - c. Demosi kepada 6 karu
4. Meminya kepada Komisi IX DPR RI untuk mengembalikan status RS Haji Jakarta dari PT. menjadi Yayasan.
5. Mengharapkan Komisi IX DPR RI untuk segera menyelesaikan kasus kepegawaian di RS Haji Jakarta

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan paparan/jawaban dari RS Haji Jakarta dan berbagai usul/saran/tanggapan para Anggota Komisi IX DPR RI, maka sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman yaitu : Komisi IX DPR RI akan memfasilitasi pertemuan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Pemda DKI Jakarta dan Perwakilan SP RS Haji Jakarta untuk mencari penyelesaian masalah di RS Haji Jakarta

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB

Jakarta, 19 Februari 2007

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Wakil Ketua,

MAX SOPACUA, SE, MSc.

PAPARAN KETUA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yg akan memindahkan Taspen, Asabri menjadi Wali Amanah.
- Ada 3 kelompok : Pengurus Kelompok, Swasta, Kelompok PNS, kelompok TNI/Polri.

BENDAHARA UMUM / KETUA UMUM PEKERJA SEKTOR KEHUTANAN :

- DPP mengehendaki UU No.3/1992 hanya direvisi, kekurangan-2 yg ada hanya ditambahkan saja, deviden, pelayanan.

DPC SPSI KAB. BANDUNG :

- Untuk mengalihkan pembayaran pesangon ada 2 hal :
Pesangon dimaksudkan untuk minimal 6 bulan.
Perusahaan tidak mudah melakukan PHK.

PAPARAN ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA :

- Asosiasi Dana Pensiun Indonesia :
Dibentuk oleh perusahaan
- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Boleh dibentuk oleh bank atau asuransi dan untuk umum,

Kesejahteraan pekerja :

UU Jamsostek
UU Ketenagakerjaan
UU Dana Pensiun
UU Perasuransian
UU SJSN

UU Jamsostek diusulkan :

1. Mendudukan Jamsostek sama dengan yang lain bentuknya tetap PT.
2. Jamsostek direstrukturisasi menjadi pengelola SJSN bentuknya bukan PT bisa Badan Pengelola atau Wali amanah.

KADARISMAN (ASDI) :

Pesangon dlm UU No.40/2004 sama dgn pensiun, tabungan hari tua perlindungan kesejahteraan.
Satu sistim Perlindungan supaya tidak berbenturan untuk kesejahteraan hari tua. Sistim yang dasar bentuknya Jamsostek.
Revitalisasi .
SJSN lebih luas dari Jamsostek

ASOSIASI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN :

- Masalah pesangon tidak perlu direvisi / diubah.

PROF. DR. ALLOYSIUN UWYONO, SH.,MH :

- UU No.3/1992 : hubungan pekerja dgn pengusaha
- Istilah Jamsostek = Jaminan Sosial Pekerja